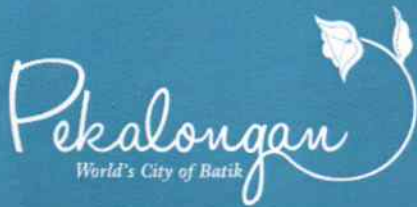




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021 - 2026**





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026**



**BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra merupakan tidak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana St ini dapat tersusun dengan baik.

Pekalongan, 24 September 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

BAB I

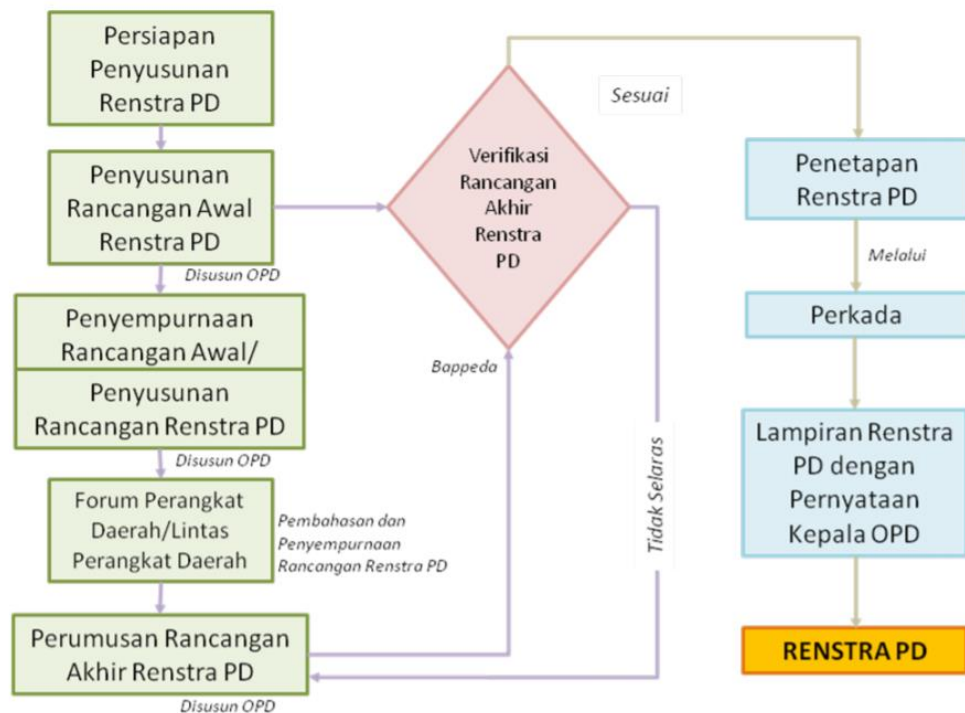
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan sebuah organisasi Perangkat Daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai Perangkat Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra BKD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan dimulai sejak dimulainya Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BKD tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar 1.1.



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Walikota Pekalongan terpilih. Penyusunan Renstra BKD disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Renstra BKD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD sebagai penyusun kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Selain

itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BKD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BKD dengan Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BKD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neoptisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 17 Tahun 2019, PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a. Merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah

- harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- b. Merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan di BKD Kota Pekalongan sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta perencanaan Pengelolaan Belanja.
 - d. Mendorong tercapainya sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
 - e. Sebagai penjabaran atau implementasi secara operasional visi, misi dan program Walikota Pekalongan terpilih.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BKD Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
- d. Memberikan pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan BKD Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BKD Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sumber daya perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya, tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; telaah renstra K/L dan renstra; telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD

BKD Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Tugas pokok BKD adalah pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

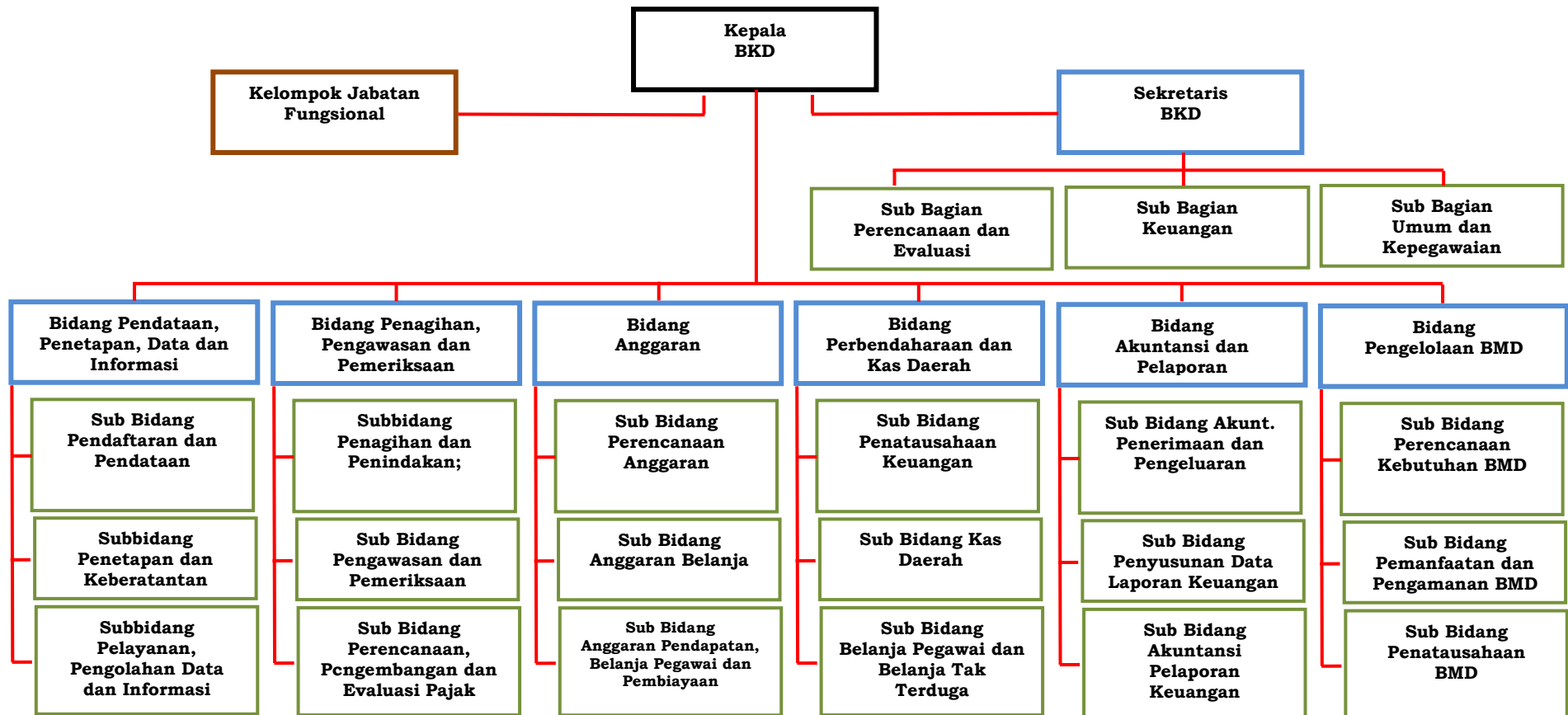
Struktur organisasi BKD Kota Pekalongan terdiri dari Susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan; dan
 - c. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - c. Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak.
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - c. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Subbidang Penatausahaan Keuangan;
 - b. Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga; dan
 - c. Subbidang Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Subbidang Penyusunan Data Laporan Keuangan; dan
 - c. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.

8. Bidang Pengelolaan BMD
 - a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD; dan
 - c. Subbidang Penatausahaan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH**



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKD Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi BKD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

b. Fungsi

- 1) perumusan sasaran, program dan kegiatan badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan kebijakan badan;
- 3) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, dan kegiatan;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program dan kegiatan;
- d) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e) menyusun bahan profil perangkat daerah;
- f) mengelola data dan informasi;
- g) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi keuangan;
- b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi anggaran;
- c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian kinerja keuangan;
- d) memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- e) melaksanakan fungsi akuntansi;

- f) menyusun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan;
- g) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d) mengelola, mengembangkan dan membina kepegawaian;
- e) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f) mengelola penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi

a. Tugas

Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) pengoordinasian bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) penyelenggaraan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) pembinaan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) perumusan bahan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- 7) penyelenggaraan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- 8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, keberatan, pengolahan data dan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 9) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- 10) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran dan pendataan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang pendaftaran dan pendataan;
- c) melaksanakan pemeriksaan konsep daftar wajib pajak dan retribusi daerah;
- d) menyusun rencana kegiatan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- e) mengevaluasi dan melaporkan hasil pendaftaran, pendataan, penilaian, monitoring dan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
- f) menyusun laporan secara periodik data objek dan wajib pajak dan retribusi daerah serta perkembangannya;
- g) menyusun bahan perumusan potensi pajak dan retribusi daerah;
- h) menyusun konsep data potensi pajak dan retribusi daerah;
- i) melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, monitoring dan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;

- j) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Penetapan dan Keberatan

Subbidang Penetapan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penetapan dan keberatan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang penetapan dan keberatan;
- c) mengevaluasi dan melaporkan hasil verifikasi data, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
- d) menyusun laporan secara periodik verifikasi data, penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerah serta perkembangannya;
- e) menyusun bahan perumusan usulan keputusan keberatan pajak dan retribusi daerah;
- f) melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring kegiatan penetapan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
- g) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi.

Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan, pengolahan data dan informasi;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang pelayanan, pengolahan data dan informasi;
- c) mengawasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- d) melaksanakan pelayanan konsultasi pajak dan retribusi daerah;
- e) menyusun bahan perumusan usulan kebijakan pengelolaan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- f) mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan, pengolahan data dan informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- g) menyusun laporan secara periodik pelayanan, pengolahan data dan informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta perkembangannya;
- h) melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan pengolahan data dan informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- i) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Tugas

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pelaporan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan;

- 3) pengoordinasian bahan penyusunan bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan;
- 4) penyelenggaraan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) penyelenggaraan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi;
- 7) penyelenggaraan pengawasan kepatuhan perpajakan daerah;
- 8) penyelenggaraan pemeriksaan pajak daerah;
- 9) penyelenggaraan penyuluhan pajak daerah;
- 10) perumusan bahan perencanaan dan evaluasi pendapatan dari sektor pajak daerah;
- 11) perumusan bahan rancangan regulasi perpajakan daerah;
- 12) penyelenggaraan pendokumentasian regulasi pajak daerah;
- 13) pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah;
- 14) pengoordinasian dan perumusan bahan pelaporan pendapatan daerah;
- 15) perumusan bahan perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah;
- 16) pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 17) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

- 1) Subbidang Penagihan dan Penindakan
Subbidang Penagihan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penagihan dan penindakan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang penagihan dan penindakan;
- c) melaksanakan penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d) menyusun bahan pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, serta penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) menyusun bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) melaksanakan penegakan sanksi perpajakan daerah;
- h) menyusun bahan usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
- i) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b) menyusun kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaan;

- c) menyusun konsep naskah dinas subbidang pengawasan dan pemeriksaan;
- d) melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- e) melaksanakan pengelolaan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
- f) mengidentifikasi pelanggaran perpajakan Daerah;
- g) melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- h) melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
- i) melaksanakan proses pengembalian kelebihan pembayaran /atau restitusi dan kajian penghapusan NPWPD;
- j) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak

Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak;
- b) menyusun kebijakan bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak;
- c) melaksanakan pengkajian, dan menyusun konsep rancangan regulasi perpajakan daerah;
- d) melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan optimalisasi pendapatan asli daerah;
- e) melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) melaksanakan fasilitasi koordinasi perumusan rencana pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- g) melaksanakan fasilitasi koordinasi evaluasi rencana pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- h) melaksanakan pengoordinasian perencanaan dan evaluasi pendapatan dari sektor pajak daerah;
- i) melaksanakan pendokumentasian regulasi pajak daerah;
- j) melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan pendapatan daerah;
- k) melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendapatan daerah;
- l) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Bidang Anggaran

a. Tugas

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan penyusunan program dan kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan dalam bidang anggaran.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang anggaran;
- 2) pengoordinasian penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pagu dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan APBD;
- 3) pengoordinasian penyiapan dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 4) pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dan Perubahan APBD, serta rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

- 5) pengoordinasian penyusunan bahan pembahasan RAPBD dengan tim anggaran eksekutif dan legislatif;
- 6) pengoordinasian pengelolaan data sebagai bahan nota keuangan dalam penyusunan RAPBD dan perubahan APBD;
- 7) pengoordinasian penyusunan pedoman teknis administratif dalam pelaksanaan APBD, meliputi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
- 8) pengoordinasian penelitian dan verifikasi rencana anggaran satuan kinerja, meliputi DPA dan DPPA yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 9) pengoordinasian penyiapan bahan untuk persetujuan dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD;
- 10) pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

1) Subbidang Perencanaan Anggaran

Subbidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugasnya adalah

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan anggaran;
- 2) menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan anggaran;
- 3) menyusun bahan perencanaan dan penyusunan anggaran;

- 4) menyusun bahan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) APBD;
- 5) menyusun bahan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan APBD;
- 6) menyusun bahan pembahasan KUA - PPAS dan KUPA - PPAS dengan Tim Anggaran Permerintah Daerah dan DPRD;
- 7) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 8) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Anggaran Belanja

Subbidang Anggaran Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang anggaran belanja;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang anggaran belanja;
- c) menyusun bahan belanja daerah selain belanja pegawai;
- d) menyusun bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- f) menyusun bahan regulasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- g) mendokumentasikan dokumen APBD dan Perubahan APBD;
- h) melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- i) melaksanakan publikasi rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - j) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.

Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- c) menyusun bahan perumusan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- d) mengelola data perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- e) melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- f) menyusun bahan regulasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- g) melaksanakan verifikasi dan validasi rencana anggaran pendapatan dan belanja pegawai yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah bersama tim anggaran;
- h) melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana

Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;

- i) menyusun bahan perencanaan dan penyusunan anggaran pembiayaan bersama tim anggaran;
- j) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengembangan yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja pegawai dan pembiayaan;
- k) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Tugas

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 3) pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- 4) pengoordinasian penatausahaan dan pelaksanaan pembiayaan daerah;
- 5) pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya serta bantuan keuangan provinsi;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM;
- 7) pengoordinasian pemrosesan, penerbitan, pendistribusian dan pencairan SP2D;
- 8) pengoordinasian pengelolaan penerbitan daftar gaji pegawai negeri sipil dan penerbitan SKPP;

- 9) pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi dengan instansi terkait;
- 11) pengoordinasian pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Iuran Jaminan Pegawai, Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ke Rekening Kas Umum Negara sesuai peraturan PerUndang – Undang;
- 12) pengoordinasian penyaluran dan pelaporan belanja tak terduga dengan instansi terkait;
- 13) pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD;
- 14) pengoordinasian pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- 15) pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- 16) pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD;
- 17) pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 18) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

1) Subbidang Penatausahaan Keuangan

Subbidang Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penatausahaan keuangan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang penatausahaan keuangan;
- c) melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM;
- d) melaksanakan koordinasi atas penyaluran dan pelaporan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya (DAK);
- e) menyusun pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD terkait belanja;
- f) menyusun bahan perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ) belanja;
- g) melaksanakan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
- h) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas perbendaharaan belanja; dan
- i) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga

Subbidang Belanja Pegawai dan Belanja Tak Terduga dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang belanja pegawai dan belanja tak terduga;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang belanja pegawai dan belanja tak terduga;

- c) melaksanakan pengelolaan penerbitan daftar gaji pegawai negeri sipil;
- d) melaksanakan koordinasi atas penyaluran dana bantuan keuangan provinsi;
- e) melaksanakan penelitian dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
- f) melaksanakan penyusunan pelaporan SPT Masa PPh 21 bagi pegawai negeri sipil;
- g) melaksanakan koordinasi atas penyaluran dan pelaporan belanja tak terduga dengan instansi terkait;
- h) menyusun pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD terkait belanja pegawai;
- i) menyusun bahan perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan gaji pegawai dan pertanggungjawaban (SPJ) gaji pegawai;
- j) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas perbendaharaan belanja;
- k) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- l) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbidang Kas Daerah

Subbidang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang kas daerah;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang kas daerah;
- c) melaksanakan penerbitan SPD;
- d) melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan pencairan SP2D;
- e) melaksanakan koordinasi atas penyaluran dan pelaporan dana perimbangan dan transfer lainnya (Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah);

- f) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan fihak ketiga (PFK) dan rekonsiliasi dengan instansi terkait;
- g) melaksanakan pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Iuran Jaminan Pegawai, Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ke Rekening Kas Umum Negara sesuai peraturan PerUndang – Undangan;
- h) melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi pajak pihak ke Tiga;
- i) melaksanakan pengelolaan buku kas umum daerah dan penyusunan laporan posisi kas;
- j) melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
- k) melaksanakan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- l) melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- m) menyusun pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD terkait kas daerah;
- n) menyusun bahan perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pertanggungjawaban (SPJ) pendapatan;
- o) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas pengelolaan kas;
- p) melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- q) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- r) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan analisis dan evaluasi laporan keuangan.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja akuntansi dan pelaporan;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang akuntansi dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 4) pengoordinasian rekonsiliasi dan verifikasi data laporan keuangan;
- 5) pengoordinasian penyusunan laporan realisasi APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- 6) pengoordinasian penyusunan laporan realisasi APBD Semester I dan prognosis 6 (enam) bulan ke depan;
- 7) pengoordinasian konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 8) pengoordinasian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
- 9) pengoordinasian perbaikan/ tindak lanjut atas koreksi/ hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 10) pengoordinasian penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 11) pengoordinasian penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- 12) pengoordinasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- 13) penyelenggaraan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
- 14) penyelenggaraan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) daerah;
- 15) pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- 16) pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- 17) pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 18) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

- 1) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
Tugasnya adalah
 - a) menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang penyusunan pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
 - c) melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d) melaksanakan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran ;
 - e) melaksanakan pemantauan atas posting penerimaan dan pengeluaran;
 - f) melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;

- g) melaksanakan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial);
- h) melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan laporan penerimaan dan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
- i) menyusun laporan realisasi APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- j) menyusun laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- k) menyusun bahan untuk perbaikan/ tindak lanjut atas koreksi/ hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l) melaksanakan pembinaan teknis pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- m) melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- n) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- o) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Penyusunan Data Laporan Keuangan

Subbidang Penyusunan Data Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penyusunan data laporan keuangan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang penyusunan data laporan keuangan;

- c) mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d) melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran ;
- e) melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
- f) menyusun catatan atas laporan keuangan;
- g) menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h) melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;
- i) melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j) menyusun bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- k) menganalisa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- l) menyusun bahan kebijakan dan sistem serta prosedur akuntansi;
- m) melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- n) melaksanakan fasilitasi penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- o) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas penyusunan data laporan keuangan;
- p) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- q) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan

Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi pelaporan keuangan;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang akuntansi pelaporan keuangan;
- c) menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas;
- d) melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- e) menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f) menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g) menyusun bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h) menyusun bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i) melaksanakan finalisasi dan publikasi Peraturan Daerah Laporan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j) menyusun bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k) menyusun bahan kebijakan dan sistem serta prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l) menyusun bahan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- m) melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- n) menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas akuntansi pelaporan keuangan;
- o) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

7. Bidang Pengelolaan BMD

a. Tugas

Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pengamanan BMD serta penatausahaan BMD.

b. Fungsi

- 1) perumusan program kerja bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 3) pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 4) pengoordinasian penyusunan standar harga;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- 9) penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- 11) pengoordinasian perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- 12) pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD

Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan kebutuhan BMD;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan kebutuhan BMD;
- c) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- d) melaksanakan koordinasi penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- e) menyusun bahan standarisasi biaya dan harga Pemerintah Kota Pekalongan;
- f) melaksanakan pengadaan kendaraan dinas;
- g) melaksanakan pendistribusian kendaraan dinas;
- h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang pemanfaatan dan pemberdayaan BMD;

- b) menyusun bahan kebijakan bidang pemanfaatan dan pemberdayaan BMD;
- c) menyusun bahan perencanaan pemanfaatan BMD;
- d) menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung milik daerah lainnya;
- e) melaksanakan penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD;
- f) melaksanakan penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- g) melaksanakan pemanfaatan BMD;
- h) menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan BMD;
- i) menyusun bahan perencanaan pengamanan BMD;
- j) melaksanakan pengamanan BMD;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan BMD;
- l) melaksanakan penyimpanan dokumen asli kepemilikan BMD;
- m) melaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah dan bangunan;
- n) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- o) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Subbidang Penatausahaan BMD

Subbidang Penatausahaan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD.

Tugasnya adalah

- a) menyusun rencana kegiatan bidang penatausahaan BMD;
- b) menyusun bahan kebijakan bidang penatausahaan BMD;
- c) menyusun bahan penetapan status penggunaan BMD;

- d) melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah tetap dan barang persediaan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan menyusun laporan neraca BMD;
- f) melaksanakan pengelolaan dan menyusun laporan barang persediaan;
- g) menyusun konsep pelaksanaan inventarisasi BMD;
- h) melaksanakan koordinasi terkait pengembangan aplikasi pengelolaan BMD;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan subbidang penatausahaan BMD;
- j) melaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian BMD;
- k) mengelola kegiatan koordinasi dalam rangka pemindahtanganan BMD;
- l) mengelola proses penghapusan barang milik daerah;
- m) menyusun bahan pertimbangan rekomendasi penghapusan barang persediaan;
- n) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- o) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.2 Sumber Daya BKD

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BKD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Agustus 2021, tercatat sebanyak 64 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKD Kota Pekalongan

(data per 31 Agustus 2020)

No	Bidang	Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA/S MK	D-1	D-3	S-1	S-2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat	1	1	0	1	4	3	10
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	5	0	0	6	1	12
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	0	1	2	1	3	2	9
4	Anggaran	0	0	0	1	4	2	7
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	1	0	1	5	1	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	0	1	5	2	8
7	Pengelolaan BMD	0	2	0	1	7	0	10
	Jumlah (orang)	1	10	2	6	34	11	64
	Persentase (%)	1,56%	15,63%	3,13%	9,38%	53,13%	17,19%	100,00%

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan

**Berdasarkan Jenis Kelamin
(data per 31 Agustus 2021)**

No	Bidang	Jenis Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	7	3	10
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	7	5	12
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	7	2	9
4	Anggaran	2	5	7
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	6	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	2	6	8
7	Pengelolaan BMD	6	4	10
	Jumlah (orang)	33	31	64
	Persentase (%)	51,56%	48,44%	100,00%

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan
(data per 31 Agustus 2021)**

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (orang)
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sekretariat	0	2	6	2	10
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	2	9	1	12
3	Penagihan,	0	4	4	1	9

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (orang)
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengawasan, dan Pemeriksaan					
4	Anggaran	0	0	5	2	7
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	0	7	1	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	7	1	8
7	Pengelolaan BMD	0	3	6	1	10
	Jumlah (orang)	0	11	44	9	64
	Persentase (%)	0,00%	17,19%	68,75%	14,06%	100,00%

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak adalah pegawai Golongan III sebanyak 44 orang atau sebesar (68,75).

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BKD Kota Pekalongan
Tahun 2021
(Data per 31 Desember 2020)

Nama Barang	Jumlah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Badan Keuangan Daerah	2.283	10.092.287.566,50	7.458.265.628,50	2.634.021.938,00
ALAT BESAR				
- Stationary Generating Set	1	284.828.000,00	284.828.000,00	0
- Pompa Lain-lain	2	1.740.000,00	1.068.572,00	671.428,00
Jumlah	3	286.568.000,00	285.896.572,00	671.428,00

Nama Barang	Jumlah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ALAT ANGKUTAN				
- Station Wagon	12	3.023.761.800,00	992.891.285,00	2.030.870.515,00
- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2	198.400.000,00	198.400.000,00	0
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	156.310.000,00	156.310.000,00	0
- Pick Up	2	215.887.000,00	187.760.284,00	28.126.716,00
- Sepeda Motor	62	907.453.166,00	826.358.260,00	81.094.906,00
- Gerobak Tarik	6	15.476.352,00	15.476.352,00	0
- Lori Dorong	3	1.950.000,00	1.950.000,00	0
Jumlah	88	4.519.238.318,00	2.379.146.181,00	2.140.092.137,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
- Mesin Bor	1	500.000,00	350.000,00	150.000,00
- Rol Meter	2	14.400.000,00	14.400.000,00	0
- Global Positioning System	5	105.550.000,00	48.180.000,00	57.370.000,00
- DCP (Alat Control) Sensor	2	4.500.000,00	4.500.000,00	0
- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	15.200.000,00	15.200.000,00	0
Jumlah	14	140.150.000,00	82.630.000,00	57.520.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	800.000,00	800.000,00	0
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	2.783.700,00	2.783.700,00	0
- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	7.650.000,00	7.650.000,00	0
- Mesin Fotocopy Folio	1	12.450.000,00	9.960.000,00	2.490.000,00
- Mesin Plate Folio	1	550.000,00	550.000,00	0
- Lemari Besi/Metal	21	42.550.000,00	36.550.000,00	6.000.000,00
- Lemari Kayu	19	51.139.666,00	44.750.039,00	6.389.627,00
- Rak Besi	1	1.350.000,00	1.350.000,00	0
- Rak Kayu	14	7.450.000,00	7.450.000,00	0
- Filing Cabinet Besi	38	37.265.000,00	37.265.000,00	0
- Lemari Sorok	2	2.705.000,00	2.705.000,00	0
- Lemari Kaca	25	86.104.000,00	86.104.000,00	0
- Lemari Makan	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0
- White Board	5	2.600.000,00	2.600.000,00	0
- Peta	2	500.000,00	500.000,00	0
- Alat Penghancur Kertas	2	5.350.000,00	3.790.000,00	1.560.000,00
- Mesin Absensi	9	26.502.500,00	7.401.000,00	19.101.500,00
- Alat Pemotong Kertas	5	9.559.500,00	5.423.800,00	4.135.700,00
- Perforator Besar	1	61.213.200,00	61.213.200,00	0
- Overhead Projector	1	8.114.654,00	8.114.654,00	0
- Papan Nama Instansi	380	340.822.668,00	304.535.486,00	36.287.182,00
- Papan Pengumuman	5	1.910.000,00	1.613.000,00	297.000,00
- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	46	137.309.738,00	134.269.738,00	3.040.000,00
- Meja Kerja Besi/Metal	1	800.000,00	800.000,00	0
- Meja Kerja Kayu	5	5.500.000,00	5.500.000,00	0

Nama Barang	Jumlah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kursi Besi/Metal	16	36.215.000,00	36.215.000,00	0
- Kursi Kayu	6	640.000,00	640.000,00	0
- Sice	4	20.181.750,00	20.181.750,00	0
- Meja Rapat	107	195.195.527,50	193.215.527,50	1.980.000,00
- Meja Telepon	4	1.900.000,00	1.900.000,00	0
- Meja Podium	3	13.500.000,00	13.500.000,00	0
- Meja Resepsionis	8	48.070.496,00	28.842.288,00	19.228.208,00
- Meja Tambahan	1	6.008.812,00	3.605.286,00	2.403.526,00
- Meja Panjang	3	25.757.500,00	25.757.500,00	0
- Meja Makan Besi	1	2.250.000,00	2.250.000,00	0
- Kursi Rapat	464	200.024.955,00	200.024.955,00	0
- Kursi Tamu	1	500.000,00	500.000,00	0
- Kursi Putar	16	5.771.750,00	5.771.750,00	0
- Kursi Biasa	18	900.000,00	900.000,00	0
- Kursi Lipat	33	8.786.200,00	8.786.200,00	0
- Meja Komputer	37	13.837.000,00	13.837.000,00	0
- Sofa	2	19.890.000,00	16.890.000,00	3.000.000,00
- Kursi Tangan	4	5.850.000,00	5.850.000,00	0
- Meja Tulis	59	18.800.000,00	18.800.000,00	0
- Jam Mekanis	1	350.000,00	350.000,00	0
- Mesin Pemotong Rumpuk	3	14.550.000,00	14.550.000,00	0
- Alat Pembersih Lain-lain	3	4.450.000,00	4.450.000,00	0
- Lemari Es	7	14.650.000,00	13.090.000,00	1.560.000,00
- A.C. Window	9	67.033.354,00	67.033.354,00	0
- A.C. Split	41	270.188.259,00	237.266.259,00	32.922.000,00
- Kipas Angin	2	830.000,00	830.000,00	0
- Exhaust Fan	2	900.000,00	720.000,00	180.000,00
- Kompor Gas (Alat Dapur)	3	1.275.000,00	1.275.000,00	0
- Kitchen Set	3	28.200.000,00	28.200.000,00	0
- Tabung Gas	4	2.315.000,00	2.315.000,00	0
- Televisi	11	79.107.500,00	51.159.500,00	27.948.000,00
- Video Cassette	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0
- Amplifier	1	300.000,00	300.000,00	0
- Loudspeaker	24	49.611.400,00	49.611.400,00	0
- Sound System	6	26.681.350,00	26.681.350,00	0
- Wireless	1	6.498.600,00	6.498.600,00	0
- Megaphone	1	600.000,00	600.000,00	0
- Microphone	2	770.000,00	770.000,00	0
- Microphone Table Stand	2	1.243.000,00	1.243.000,00	0
- Camera Video	18	34.536.000,00	18.764.400,00	15.771.600,00
- Camera film	2	10.700.000,00	10.700.000,00	0
- Tangga Aluminium	4	3.650.000,00	3.650.000,00	0
- Dispenser	15	28.750.000,00	25.690.000,00	3.060.000,00
- Mimbar/Podium	1	3.400.000,00	3.400.000,00	0

Nama Barang	Jumlah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Handy Cam	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0
- Gordyin/Kray	114	95.108.645,00	95.108.645,00	0
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	11.036.075,00	10.482.315,00	553.760,00
- Alat Pemadam/Portable	5	7.125.000,00	7.125.000,00	0
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	5.300.500,00	5.300.500,00	0
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	18	36.956.750,00	31.916.750,00	5.040.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	36	88.451.000,00	84.811.000,00	3.640.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	4.650.000,00	3.720.000,00	930.000,00
- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	950.000,00	950.000,00	0
- Meja Tamu Biasa	1	3.375.000,00	3.375.000,00	0
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	4.000.000,00	2.960.000,00	1.040.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	18	25.950.000,00	23.020.000,00	2.930.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	44	46.400.000,00	41.750.000,00	4.650.000,00
- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4	3.600.000,00	3.600.000,00	0
- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	9.110.000,00	9.110.000,00	0
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	59.000.000,00	59.000.000,00	0
- Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5	1.355.000,00	1.355.000,00	0
Jumlah	1.841	2.540.516.049,50	2.334.377.946,50	206.138.103,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCARAN				
- Telephone Hybrid	2	965.500,00	965.500,00	0
- Microphone/Wireless MIC	8	15.396.500,00	14.806.500,00	590.000,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	64.850.000,00	64.850.000,00	0
- Proyektor + Attachment	9	81.844.250,00	72.549.750,00	9.294.500,00
- Camera Electronic	2	4.900.000,00	3.920.000,00	980.000,00
- Slide Projector	1	15.189.100,00	15.189.100,00	0
- PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM LAIN-LAIN	1	450.000,00	450.000,00	0
- Mesin Cetak Offset Roll	1	225.000.000,00	225.000.000,00	0
- Telephone (PABX)	1	31.125.000,00	31.125.000,00	0
- Intermediate Telephone/Key Telephone	1	2.320.000,00	2.320.000,00	0
- Pesawat Telephone	16	8.650.000,00	8.650.000,00	0
- Telephone Mobile	8	14.688.200,00	12.080.560,00	2.607.640,00
- Handphone	1	2.600.000,00	520.000,00	2.080.000,00
- Wireless Amplifier	1	3.750.000,00	3.750.000,00	0
- Receiver STL/VHF (FM)	1	1.850.000,00	1.295.000,00	555.000,00
- Receiver STL/UHF	3	3.284.000,00	2.158.800,00	1.125.200,00
Jumlah	66	476.862.550,00	459.630.210,00	17.232.340,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
- Tabung Oksigen	1	2.335.000,00	2.335.000,00	0
Jumlah	1	2.335.000,00	2.335.000,00	0

Nama Barang	Jumlah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ALAT LABORATORIUM				
- Thermometer Badan	3	3.850.000,00	962.500,00	2.887.500,00
Jumlah	3	3.850.000,00	962.500,00	2.887.500,00
KOMPUTER				
- Local Area Network (LAN)	1	4.500.000,00	4.500.000,00	0
- P.C Unit	67	585.050.802,00	511.681.052,00	73.369.750,00
- Lap Top	29	250.398.612,00	205.409.862,00	44.988.750,00
- Note Book	25	224.166.104,00	209.566.104,00	14.600.000,00
- Plotter (Peralatan Mainframe)	1	51.300.000,00	51.300.000,00	0
- Hard Disk	19	19.635.720,00	18.298.040,00	1.337.680,00
- Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	61.000.000,00	61.000.000,00	0
- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	20	65.005.137,00	55.007.387,00	9.997.750,00
- Peralatan Mini Komputer Lain-lain	2	49.450.000,00	37.087.500,00	12.362.500,00
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	82	437.088.124,00	422.188.374,00	14.899.750,00
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0
- External	1	1.265.000,00	1.265.000,00	0
- External/ Portable Hardisk	4	4.800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	28.150.000,00	21.112.500,00	7.037.500,00
- Server	5	317.801.400,00	292.951.400,00	24.850.000,00
- Router	2	3.593.750,00	1.898.750,00	1.695.000,00
- Modem	1	1.650.000,00	1.650.000,00	0
- Wireless Access Point	1	989.000,00	247.250,00	741.750,00
- Peralatan Jaringan Lain-lain	3	6.324.000,00	6.324.000,00	0
Jumlah	266	2.118.167.649,00	1.908.687.219,00	209.480.430,00
PERALATAN OLAH RAGA				
- Alat Tenis Meja	1	4.600.000,00	4.600.000,00	0
Jumlah	1	4.600.000,00	4.600.000,00	0
TOTAL	2.283	10.092.287.566,50	7.458.265.628,50	2.634.021.938,00

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

2.3.1 Perencanaan Kinerja

BKD Kota Pekalongan memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, karena keuangan daerah merupakan factor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan daya dukung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra OPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Dalam perkembangannya BKD Kota Pekalongan menyempurnakan kinerja dan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencapai target yang ditetapkan sebagai skala prioritas Perangkat Daerah yaitu Opini BPK RI atas Laporan Keuangan, Penetapan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu dan Presentase Penyerapan Belanja APBD.

Kinerja Keuangan 5 Tahun terakhir

Tabel 2.5

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Realisasi)

TAHUN	PAD	Total Pendaptan	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	178.604.460.870	857.642.985.779	20,83%
2017	192.002.871.181	915.920.377.495	20,96%
2018	179.224.408.698	905.231.572.568	19,80%
2019	212.777.435.294	971.624.464.121	21,90%
2020	229.867.935.361	953.155.394.615	24,12%
2021*	203.812.400.000	937.933.186.000	21,73%
Rata-rata pertumbuhan	9,01%	3,40%	5,35%

*) data target tahun 2021

Tabel 2.6

Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	177.984.656.000	178.604.460.870	100,35%
2017	197.597.634.000	192.002.871.181	97,17%
2018	199.813.870.000	179.224.408.698	89,70%
2019	209.577.100.000	212.777.435.294	101,53%
2020	172.993.386.000	229.867.935.361	132,88%
2021*	203.812.400.000	N/A	N/A

*) data target tahun 2021

Tabel 2.7
Peningkatan PAD

TAHUN	REALISASI	% kenaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	178.604.460.870		
2017	192.002.871.181	7,50%	Kenaikan
2018	179.224.408.698	-6,66%	Penurunan
2019	212.777.435.294	18,72%	Kenaikan
2020	229.867.935.361	8,03%	Kenaikan
2021*	203.812.400.000	-11,34%	Penurunan
Rata-rata pertumbuhan		5,62%	

*) data target tahun 2021

Tabel 2.8
Peningkatan Pendapatan Daerah

TAHUN	REALISASI	% kenaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	857.642.985.779	5,92%	Kenaikan
2017	915.920.377.495	6,80%	Kenaikan
2018	905.231.572.568	-1,17%	Penurunan
2019	971.624.464.121	7,33%	Kenaikan
2020	953.155.394.615	-1,90%	Penurunan
2021*	937.933.186.000	-1,60%	Penurunan
Rata-rata pertumbuhan		2,56%	

*) data target tahun 2021

Tabel 2.9
Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Laporan
Pertanggungjawaban APBD

TAHUN	Perda APBD	Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2017	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2018	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2019	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2020	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2021*	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

*) data target tahun 2021

Tabel 3.13
Opini BPK terhadap LKD

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
6	2021*	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%

*) data target tahun 2021

Tabel 2.10
Persentase jumlah bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang bersertifikat

TAHUN	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	Total bidang tanah yang dimiliki	%
(1)	(2)	(3)	(4)
2016			
2017			
2018			
2019			
2020	1.155	3.054	37,82%
2021*	1.115	3.075	36,26%

*) data target tahun 2021

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kota Pekalongan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Keuangan Daerah											
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	%	-	4,00	4,00	-	4,90	22,73	22,73	4,50	tercapai
	- Jumlah WP/ WR yang dilayani	WP/WR	100	2500	2500	18.000	4500	19485	19485	2500	tercapai
	- Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	surat	500	6000	9000	9.000	19026	9387	9387	9000	tercapai
	- Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	Buku	-	4	1	1	4	1	1	1	tercapai
	- Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	Buku	-	54	0	94	53	93	93	0	belum tercapai
	- Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	berkas	-	2000	2000	2.000	2570	2963	2963	2000	tercapai
	- Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	kali	6	6	6	6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Aplikasi	-	1	2	1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah Sistem Informasi Pendapatan	Aplikasi	-	6	6	5	6	14	14	6	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang dilakukan pemeliharaan										
	- Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Lembar	83000	88000	92000	90.000	90793	95680	95680	92000	tercapai
	- Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	Objek	-	2500	2000	2.000	2500	2000	2000	2000	tercapai
	- Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	Buku	-		1	1	10	1	1	1	tercapai
2	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	%	-	61,50	63,00	-	62,07	37,82	37,82	64,50	belum tercapai
3	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
4	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	buku	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	buku	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	3	1	2	3	2	2	1	tercapai
	- Jumlah Sertifikat yang diajukan	bidang	40	30	32	282	150	282	282	32	tercapai
	- Jumlah Patok batas tanah yang diadakan	patok	-	600	600	600	600	600	600	600	tercapai
	- Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan	kali	-	5	5	1	5	5	5	5	tercapai
	- Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang	OPD	62	27	30	30	27	60	60	30	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	daerah dan persediaan										
	- Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	Unit Kerja	-	36	36	36	36	72	72	36	tercapai
	- Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	Laporan		67	67	67	67	67	67	67	tercapai
	- Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	jenis	3	3	3	3	4	3	3	3	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	unit	4	3	8	10	3	14	14	8	tercapai
	- Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terhabilitasi sedang / berat	unit	10	3	2	1	1	1	1	2	tercapai
	- Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	-	3	3	3	1	0	0	3	belum tercapai
5	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
6	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	4	4	4	4	4	4	4	tercapai
	- Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pekalongan yang disusun										
	- jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	100	100 buku	100 buku	4	4	4	4	100 buku	tercapai
	- Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	kali	2	66 OPD/Unit kerja	66 OPD/Unit kerja	2	67	2	2	66 OPD/Unit kerja	tercapai
	- Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kali	12	6	12	6	12	6	6	12	tercapai
7	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	Laporan	4	14	14	14	14	14	14	14	tercapai
	- Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	OPD	1 bulan	12 kali	12 kali	67	12	67	67	12 kali	tercapai
	- Jumlah pendampingan pemanfaatan SIMRAL	kali	-	1	1	1	1	1	1	1	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang dilaksanakan										
	- Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	-	67	67	67	67	67	67	67	tercapai
	- Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	laporan	-	-	7	7	2	28	28	7	tercapai
	- Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	tercapai
	- Jumlah publikasi laporan keuangan	kali	2	-	1	1	-	1	1	1	tercapai
8	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	%	-	100,00	100,00	-	108,92	100,00	100,00	100,00	tercapai
9	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	%	-	100,00	100,00	-	27,71	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah surat tagihan/surat pemberitahuan pembayaran/surat peringatan yang diterbitkan	surat	300 WP/WR	54 persen	25.000	5.100	54,1 persen	6196	6196	4000	tercapai
	- Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	kali	200 orang	150 orang	1	1	300 orang	1	1	1	tercapai
	- Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	kali	12 bulan	50	50	50	50	50	50	50	tercapai
	- Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	berkas	-	1500	1.500	1.500	1870	1887	1887	2000	tercapai
	- Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	OP/WP	-	22	8	8	22	8	8	75	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
11	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	%	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	sisdur	1	1	1	1	1	1	1	0	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	kali	-	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah laporan kerugian daerah yang disusun	kali	-	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	kali	-	12	12	12	12	12	12	-	tercapai
	- Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	laporan	-	2	30	2	12	2	2	2	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	kali	200 orang	300 orang	300 orang	1	-	1	1	5	tercapai
	- Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	data	4000	3200	3.200	3.200	3.223	3299	3299	3.120	tercapai
	- Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	kali	4000 data	13	13	13	3100 orang	13	13	14	tercapai
	- Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	PD/Unit Kerja	63	66 PD/Unint kerja	66	67	67 PD/Unint kerja	268	268	80	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	kali	-	4	4	4	4	4	4	4	tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rumah tangga										
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	11	11	11	11	11	11	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	12 bulan	550	550	200	819	289	289	550	tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	45	53	30	58	53	42	42	47	belum tercapai
	- Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	unit	1	1	1	1	0	1	1	1	tercapai
	- Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	100	42	19	61	40	68	68	19	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	tercapai

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	13	6	6	6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	laporan	6	6	6	6	6	4	6	6	tercapai
	- Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	-	-	-	6	-	6	6	6	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	-	-	12	12	-	12	12	12	tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	-	-	-	5	-	5	5	5	tercapai
4	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	tercapai
	- Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	1	12	12	1	1	1	1	12	tercapai

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kota Pekalongan
 (*tahun 2021 bersifat sementara)

dalam ribuan rupiah

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah	14.265.100	15.402.342	12.047.307	12.507.981	13.036.561	26.384.313	13.178.009	14.433.357	10.516.154	11.390.409	11.746.082	11.702.298	92,38%	93,71%	87,29%	91,07%	90,10%	44,35%	19,33%	-1,31%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.021.112	3.532.495	3.005.500	2.476.850	2.307.390	14.107.759	2.771.856	3.281.740	2.682.458	2.229.845	1.876.725	7.161.113	91,75%	92,90%	89,25%	90,03%	81,34%	50,76%	97,80%	49,80%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000	112.000	50.000	-	50.000	40.000	148.132	92.916	28.535	-	39.273	20.367	95,57%	82,96%	57,07%	#DIV/0!	78,55%	50,92%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	112.000	50.000	-	50.000	40.000	49.950	92.916	28.535	-	39.273	20.367	99,90%	82,96%	57,07%	#DIV/0!	78,55%	50,92%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga	105.000	-	-	-	-	-	98.182	-	-	-	-	-	93,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.466.792	2.030.675	1.730.500	1.304.800	1.247.350	908.000	1.401.149	1.921.591	1.639.660	1.270.803	1.001.744	551.516	95,52%	94,63%	94,75%	97,39%	80,31%	60,74%	-6,51%	-13,23%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000	15.750	10.000	10.000	5.000	7.500	5.000	14.563	9.378	9.994	4.134	2.633	100,00%	92,46%	93,78%	99,94%	82,67%	35,11%	35,70%	13,46%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.000	521.000	336.000	50.000	235.350	395.000	262.316	507.711	324.751	46.113	210.442	243.875	95,39%	97,45%	96,65%	92,23%	89,42%	61,74%	81,47%	68,79%
Penyediaan alat tulis kantor	155.000	190.000	210.000	190.000	307.500	-	155.000	189.992	195.044	189.268	299.071	-	100,00%	100,00%	92,88%	99,61%	97,26%	#DIV/0!	-2,91%	-3,94%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.800	28.000	22.000	20.000	36.000	18.000	25.746	22.608	20.600	17.236	33.266	9.406	86,40%	80,74%	93,63%	86,18%	92,41%	52,26%	-1,31%	-3,22%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.992	145.000	120.000	120.000	100.000	110.000	114.078	134.949	111.136	119.950	84.130	71.649	84,51%	93,07%	92,61%	99,96%	84,13%	65,14%	-3,30%	-7,22%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000	85.000	80.000	62.300	50.000	50.000	149.800	82.050	79.750	36.699	46.543	28.959	99,87%	96,53%	99,69%	58,91%	93,09%	57,92%	-18,22%	-22,59%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.905	2.010	1.920	1.920	1.925	1.320	95,25%	80,40%	76,80%	76,80%	77,00%	52,80%	5,00%	-6,03%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.000	1.043.425	950.000	850.000	511.000	325.000	687.304	967.708	897.082	849.625	322.235	193.675	96,13%	92,74%	94,43%	99,96%	63,06%	59,59%	-9,97%	-14,75%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.000	275.000	300.000	128.250	80.000	200.000	306.721	251.409	271.875	111.795	29.918	69.525	91,01%	91,42%	90,62%	87,17%	37,40%	34,76%	9,16%	-1,93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337.000	75.000	300.000	128.250	80.000	200.000	306.721	58.899	271.875	111.795	29.918	69.525	91,01%	78,53%	90,62%	87,17%	37,40%	34,76%	55,48%	56,21%
Pembangunan gedung kantor	-	200.000	-	-	-	-	-	192.510	-	-	-	-	#DIV/0!	96,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.120	824.320	621.000	702.200	605.400	714.570	689.268	770.546	486.510	574.915	561.891	497.172	88,02%	93,48%	78,34%	81,87%	92,81%	69,58%	-0,42%	-4,14%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	7.696	1.718	2.335	2.388	4.111	2.487	96,20%	57,28%	77,82%	79,60%	68,52%	82,90%	-2,50%	-1,38%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.520	635.320	513.000	594.200	506.400	506.400	532.172	600.827	400.175	472.527	467.780	342.879	86,88%	94,57%	78,01%	79,52%	92,37%	67,71%	-2,90%	-6,02%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.600	186.000	105.000	105.000	93.000	205.170	149.400	168.000	84.000	100.000	90.000	151.806	91,88%	90,32%	80,00%	95,24%	96,77%	73,99%	16,01%	8,03%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.750	150.000	151.000	170.000	166.140	133.530	110.096	118.974	108.383	103.059	88.941	67.662	69,35%	79,32%	71,78%	60,62%	53,53%	50,67%	-2,83%	-8,67%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	158.750	150.000	151.000	170.000	166.140	133.530	110.096	118.974	108.383	103.059	88.941	67.662	69,35%	79,32%	71,78%	60,62%	53,53%	50,67%	-2,83%	-8,67%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	27.500	30.000	30.000	23.500	24.250	10.000	15.804	24.987	27.723	19.958	10.838	100,00%	57,47%	83,29%	92,41%	84,93%	44,69%	33,12%	10,68%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.750	5.000	7.151	7.364	8.965	6.981	4.243	100,00%	71,51%	73,64%	89,65%	69,81%	36,11%	23,50%	1,28%
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	-	7.500	10.000	10.000	-	-	-	-	8.525	9.100	-	-	#DIV/0!	0,00%	85,25%	91,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.250	5.000	8.653	9.098	9.658	9.801	-	100,00%	86,53%	90,98%	96,58%	98,01%	0,00%	4,50%	-2,83%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dokumen RKA-SKPD																				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.500	10.250	-	-	-	-	3.176	6.595	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	90,75%	64,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.450	100.000	103.000	131.600	135.000	12.077.909	97.450	99.200	103.000	131.600	135.000	5.944.033	100,00%	99,20%	100,00%	100,00%	100,00%	49,21%	1776,51%	867,79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	11.940.659	-	-	-	-	-	5.851.503	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	49,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.450	100.000	103.000	131.600	135.000	135.000	97.450	99.200	103.000	131.600	135.000	92.200	100,00%	99,20%	100,00%	100,00%	100,00%	68,30%	7,19%	0,85%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	2.250	-	-	-	-	-	330	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	14,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.000	13.000	20.000	10.000	-	9.500	9.040	11.300	19.510	9.950	-	-	69,54%	86,92%	97,55%	99,50%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.000	13.000	20.000	10.000	-	9.500	9.040	11.300	19.510	9.950	-	-	69,54%	86,92%	97,55%	99,50%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.863.000	2.354.600	2.587.200	2.820.550	2.178.877	6.894.233	1.540.306	2.266.150	2.478.883	2.699.711	2.017.374	2.882.035	82,68%	96,24%	95,81%	95,72%	92,59%	41,80%	47,79%	16,60%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	740.000	875.000	874.200	1.047.300	1.067.572	1.048.060	637.775	843.831	839.931	1.037.028	1.025.224	611.794	86,19%	96,44%	96,08%	99,02%	96,03%	58,37%	7,61%	2,77%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	26.142	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	74,69%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	175.000	175.000	175.000	229.300	209.472	62.000	159.363	171.659	171.320	228.534	185.603	410	91,06%	98,09%	97,90%	99,67%	88,61%	0,66%	-9,60%	-15,53%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	237.500	300.000	302.100	345.000	341.000	727.530	195.308	287.276	286.127	342.955	329.820	483.308	82,23%	95,76%	94,71%	99,41%	96,72%	66,43%	30,68%	21,85%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	110.000	110.000	105.000	105.000	96.000	-	100.857	107.994	100.904	104.068	93.687	-	91,69%	98,18%	96,10%	99,11%	97,59%	#DIV/0!	-22,62%	-21,27%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tentang Penjabaran APBD																				
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	167.500	240.000	242.100	318.000	359.100	142.930	148.737	229.598	234.290	313.080	354.552	76.220	88,80%	95,67%	96,77%	98,45%	98,73%	53,33%	5,65%	4,96%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50.000	50.000	50.000	50.000	62.000	26.000	33.510	47.305	47.291	48.391	61.563	25.715	67,02%	94,61%	94,58%	96,78%	99,29%	98,90%	-6,81%	2,49%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	-	-	-	19.600	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	435.000	215.000	658.000	690.650	364.805	264.890	305.108	199.614	636.776	650.396	324.323	181.590	70,14%	92,84%	96,77%	94,17%	88,90%	68,55%	17,17%	18,48%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	85.000	85.000	65.000	75.000	45.000	87.760	80.662	81.741	63.840	66.974	42.896	51.449	94,90%	96,17%	98,22%	89,30%	95,32%	58,63%	9,38%	-6,33%
Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	200.000	-	244.000	249.000	87.500	-	182.810	-	242.073	243.545	87.480	-	91,41%	#DIV/0!	99,21%	97,81%	99,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	-	-	67.000	66.650	35.195	23.000	-	-	64.927	63.480	30.960	13.971	#DIV/0!	#DIV/0!	96,91%	95,24%	87,97%	60,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	75.000	85.000	34.000	25.000	-	-	74.370	72.925	30.664	37.500	#DIV/0!	#DIV/0!	99,16%	85,79%	90,19%	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	-	-	75.000	80.000	43.800	72.130	-	-	71.660	76.727	41.015	32.641	#DIV/0!	#DIV/0!	95,55%	95,91%	93,64%	45,25%	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Permotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																				
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	25.000	20.000	20.000	15.000	49.250	-	24.900	13.863	16.425	13.150	48.675	-	99,60%	69,32%	82,13%	87,67%	98,83%	#DIV/0!	16,67%	24,87%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	75.000	60.000	62.000	65.000	58.000	25.000	1.241	55.308	60.137	60.656	30.573	16.014	1,65%	92,18%	97,00%	93,32%	52,71%	64,06%	-15,90%	853,90%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota	50.000	50.000	50.000	55.000	12.060	32.000	15.495	48.702	43.342	52.940	12.060	30.014	30,99%	97,40%	86,68%	96,25%	100,00%	93,79%	19,45%	59,42%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	633.000	1.149.600	895.000	937.600	640.500	389.060	545.006	1.113.754	854.336	877.914	570.263	182.193	86,10%	96,88%	95,46%	93,63%	89,03%	46,83%	-1,34%	-3,85%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	67.000	112.600	120.000	117.000	92.000	57.000	63.871	110.540	119.028	113.273	90.136	8.010	95,33%	98,17%	99,19%	96,81%	97,97%	14,05%	2,54%	-7,13%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	225.000	83.000	100.000	-	8.000	-	211.989	80.494	83.510	-	4.000	#DIV/0!	94,22%	96,98%	83,51%	#DIV/0!	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	95.000	-	-	-	-	-	51.393	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	54,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	275.000	350.000	375.000	370.000	350.000	90.000	258.429	343.712	366.976	362.461	346.027	52.037	93,97%	98,20%	97,86%	97,96%	98,86%	57,82%	-9,32%	-10,19%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pertanggungjawaan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																				
Fasilitasi MP TP-TGR	75.000	-	-	-	-	-	70.717	-	-	-	-	-	94,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	38.000	62.000	42.000	41.000	30.900	10.000	34.285	55.530	39.453	16.958	25.405	-	90,22%	89,56%	93,94%	41,36%	82,22%	0,00%	-12,75%	-14,84%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	125.000	50.000	-	20.000	-	-	115.570	46.465	-	2.051	#DIV/0!	#DIV/0!	92,46%	92,93%	#DIV/0!	10,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaan Pemerintah Kabupaten/Kota	178.000	400.000	150.000	259.600	167.600	109.060	117.704	391.983	132.815	255.248	108.695	64.702	66,13%	98,00%	88,54%	98,32%	64,85%	59,33%	12,98%	32,24%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	55.000	115.000	160.000	145.000	106.000	5.192.223	52.416	108.951	147.840	134.374	97.565	1.906.458	95,30%	94,74%	92,40%	92,67%	92,04%	36,72%	982,05%	392,22%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	55.000	115.000	160.000	145.000	106.000	5.192.223	52.416	108.951	147.840	134.374	97.565	1.906.458	95,30%	94,74%	92,40%	92,67%	92,04%	36,72%	982,05%	392,22%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.338.630	6.918.255	3.234.500	3.793.774	6.683.149	2.569.300	6.924.944	6.400.834	2.643.493	3.411.051	6.127.059	511.121	94,36%	92,52%	81,73%	89,91%	91,68%	19,89%	-5,42%	-9,85%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.338.630	6.918.255	3.234.500	3.793.774	6.683.149	2.569.300	6.924.944	6.400.834	2.643.493	3.411.051	6.127.059	511.121	94,36%	92,52%	81,73%	89,91%	91,68%	19,89%	-5,42%	-9,85%
Penyusunan Standar Harga	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	55.000	92.213	92.370	89.810	94.966	94.309	6.637	92,21%	92,37%	89,81%	94,97%	94,31%	12,07%	-9,00%	-18,10%
Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	200.000	200.000	-	-	-	-	192.956	180.642	-	-	-	-	96,48%	90,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	45.000	48.000	50.000	50.000	50.000	30.000	44.375	45.150	46.780	46.235	47.700	5.435	98,61%	94,06%	93,56%	92,47%	95,40%	18,12%	-5,83%	-16,25%
Pengamanan Barang Milik	85.000	285.000	300.000	315.000	620.125	1.475.000	63.464	176.348	216.022	260.302	385.716	178.354	74,66%	61,88%	72,01%	82,64%	62,20%	12,09%	96,06%	43,06%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Daerah																				
Penilaian Barang Milik Daerah	130.000	105.000	100.000	250.000	199.100	65.000	64.554	56.496	60.966	177.164	99.876	34.478	49,66%	53,81%	60,97%	70,87%	50,16%	53,04%	7,66%	15,38%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	323.590	-	-	29.742	2.119	-	102.897	0,00%	0,00%	74,36%	7,06%	0,00%	31,80%	197,39%	#DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	225.000	165.180	190.000	150.000	150.000	-	223.138	163.350	188.367	147.147	141.471	-	99,17%	98,89%	99,14%	98,10%	94,31%	#DIV/0!	-26,52%	-27,44%
Fasilitasi Peningkatan Status Hukum atas tanah	100.000	75.000	85.000	75.000	118.500	-	71.493	66.024	61.073	36.689	103.480	-	71,49%	88,03%	71,85%	48,92%	87,32%	#DIV/0!	-13,09%	5,39%
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	285.000	77.500	75.000	70.000	58.800	-	271.112	61.977	69.090	67.405	41.000	-	95,13%	79,97%	92,12%	96,29%	69,73%	#DIV/0!	-39,74%	-41,46%
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah	575.000	197.575	-	-	-	-	573.181	195.880	-	-	-	-	99,68%	99,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	40.000	-	-	-	-	-	29.481	-	-	-	-	-	73,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	693.555	700.000	805.000	620.000	622.624	620.710	649.191	660.084	687.047	510.690	579.507	183.320	93,60%	94,30%	85,35%	82,37%	93,07%	29,53%	-1,39%	-14,96%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	4.730.075	4.470.000	1.125.000	1.503.774	4.734.000	-	4.649.785	4.240.522	851.809	1.469.166	4.634.000	-	98,30%	94,87%	75,72%	97,70%	97,89%	#DIV/0!	13,63%	19,84%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	-	465.000	364.500	630.000	-	-	-	461.991	342.787	599.168	-	-	#DIV/0!	99,35%	94,04%	95,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.042.358	2.596.992	3.220.107	3.416.807	1.867.145	2.813.021	1.940.903	2.484.632	2.711.320	3.049.801	1.724.925	1.148.029	95,03%	95,67%	84,20%	89,26%	92,38%	40,81%	12,51%	-5,45%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.042.358	2.596.992	3.220.107	3.416.807	1.867.145	2.813.021	1.940.903	2.484.632	2.711.320	3.049.801	1.724.925	1.148.029	95,03%	95,67%	84,20%	89,26%	92,38%	40,81%	12,51%	-5,45%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	127.710	148.000	326.000	270.500	47.000	131.800	125.659	135.105	312.063	243.955	37.875	13.040	98,39%	91,29%	95,72%	90,19%	80,59%	9,89%	43,39%	-6,68%
Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	56.000	107.000	133.000	115.000	105.000	-	47.620	95.939	126.105	112.332	101.970	-	85,04%	89,66%	94,82%	97,68%	97,11%	#DIV/0!	-1,37%	2,55%

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gebyar pajak daerah	180.000	45.000	-	100.000	-	-	169.360	44.800	-	94.650	-	-	94,09%	99,56%	#DIV/0!	94,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	-	-	60.000	83.300	57.000	30.000	-	-	56.250	79.600	55.550	6.850	#DIV/0!	#DIV/0!	93,75%	95,56%	97,46%	22,83%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.000	100.000	100.000	105.000	90.800	351.130	51.441	94.380	98.300	101.000	85.490	30.846	85,74%	94,38%	98,30%	96,19%	94,15%	8,78%	68,97%	2,22%
Pemutakhiran data PBB	79.890	50.000	-	-	-	-	71.270	46.272	-	-	-	-	89,21%	92,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	220.000	645.000	820.000	955.000	227.700	1.177.000	208.982	637.260	775.694	929.207	187.328	620.431	94,99%	98,80%	94,60%	97,30%	82,27%	52,71%	115,51%	79,56%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	81.000	106.040	136.000	106.000	55.050	300.000	81.000	104.690	124.289	105.200	55.050	27.414	100,00%	98,73%	91,39%	99,25%	100,00%	9,14%	86,80%	-13,05%
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	257.000	251.652	345.000	335.000	299.170	-	237.552	247.740	340.873	334.488	296.941	-	92,43%	98,45%	98,80%	99,85%	99,25%	#DIV/0!	-15,72%	-14,24%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	162.500	200.000	290.000	332.600	400.270	380.241	149.640	192.705	285.490	323.935	385.903	225.285	92,09%	96,35%	98,44%	97,39%	96,41%	59,25%	19,62%	13,58%
Verifikasi BPHTB	21.758	24.300	26.007	29.907	31.640	-	21.705	23.466	26.004	27.738	31.484	-	99,75%	96,57%	99,99%	92,75%	99,51%	#DIV/0!	-12,10%	-12,18%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	112.000	100.000	85.000	141.000	98.000	64.000	105.808	98.357	83.350	136.160	87.826	31.317	94,47%	98,36%	98,06%	96,57%	89,62%	48,93%	-5,00%	-11,76%
Penagihan Pajak Daerah	79.000	505.000	290.000	250.400	247.000	219.350	77.667	475.058	283.762	235.872	231.640	144.860	98,31%	94,07%	97,85%	94,20%	93,78%	66,04%	94,09%	83,05%
Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)	418.500	-	-	-	-	-	406.249	-	-	-	-	-	97,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	130.000	339.100	401.000	68.000	159.500	-	108.155	199.140	166.091	58.169	47.986	#DIV/0!	83,20%	58,73%	41,42%	85,54%	30,09%	#DIV/0!	#DIV/0!
Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	187.000	185.000	270.000	192.100	140.515	-	186.950	180.705	253.622	159.575	109.698	-	99,97%	97,68%	93,93%	83,07%	78,07%	#DIV/0!	-22,17%	-26,27%

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Pengembangan BKD

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, antara lain:

1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
2. Terciptanya aturan tentang Perda dan Pergub APBD, perubahan dan pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu;
3. Terpetakannya aset daerah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung pemberdayaan aset daerah guna peningkatan pendapatan daerah;
4. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur BKD Kota Pekalongan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
5. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami peran pentingnya pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur BKD Kota Pekalongan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari Pajak Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah;
6. Peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain:

1. Adanya komitmen Walikota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan *good governance* dan *clean government*;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;

3. Peningkatan SDM melalui BinteK/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
4. Sosialisasi tentang pajak daerah diarahkan langsung kepada masyarakat (WP), tidak hanya melalui aparat kelurahan atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah di harapkan dapat meningkat;
5. Pengalihan PBB-P2 pada Tahun 2013 menjadi pajak daerah, yang merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan;
6. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan terkait Kesekretariatan:

1. Belum optimalisnya kinerja perangkat daerah
2. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Kurangnya jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sehingga sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Kurangnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi public

B. Permasalahan terkait Bidang Anggaran :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran
2. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kurangnya Instrumen penganggaran/ Peraturan/ Juklak/ Juknis/ SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
4. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
5. Masih kurang Jelasnya Alur Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam

memeriksa/memverifikasi Dokumen RKASKPD dan DPA-SKPD.

C. Permasalahan terkait Bidang Akuntansi :

1. Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
2. Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;
3. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

D. Permasalahan terkait Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

1. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
2. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa OPD;
3. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran OPD ke Kantor Pelayanan Pajak;
4. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
5. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
6. Masih kurangnya instrumen Peraturan/ Juklak/ Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
7. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk diakhir tahun anggaran;
8. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun;
9. Pengendalian belanja daerah belum berjalan dengan efisien dan efektif;

E. Permasalahan terkait Bidang Aset Daerah:

1. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;
 2. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;
 3. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;
 4. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Pekalongan belum optimal terkait bukti kepemilikan
 5. Prosedur pencatatan BMD belum memadai;
- F. Permasalahan terkait Bidang Aset Daerah:
1. Belum optimalnya Penerimaan PAD;
 2. Masih tingginya tunggakan piutang pajak dan retribusi;
 3. Belum optimalnya penggalan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah;
 4. Kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah masih rendah;
 5. Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah ;
 6. Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem informasi pengelolaan keuangan belum terintegrasi	SIM Pendapatan, SIM Perencanaan, SIM Penatausahaan, SIM Aset dan SIM Persediaan masih berdiri sendiri	
	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi	
	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian penganggaran	
		Belum maksimalnya OPD dalam penyusun perencanaan anggaran	
		Dokumen Perencanaan belum berfungsi secara optimal dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.	
	Pengendalian belanja daerah belum berjalan dengan efisien dan efektif	Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan	
	Laporan Keuangan berbasis akrual belum optima	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.	
Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum Optimalnya Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib	
		Data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah belum optimal	
		Belum optimalnya sertifikasi tanah milik Pemda	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer Pemerintah Pusat,	Belum Optimalnya Penerimaan PAD	Masih tingginya tunggakan piutang pajak dan retribusi
		Belum optimalnya penggalan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah
		Kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah masih rendah
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah
		Pengalihan pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat
Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal	Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan
		Belum optimalnya pemahaman hak dan kewajiban aparatur serta implementasi kebijakan reward dan punishment
		Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Kurangnya kegiatan bintek/kursus/ pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparatur

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-7 yaitu : “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 3.2

Telaah visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan yang disusun OPD belum tepat waktu 2) Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal 	Faktor Pendorong : <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen kepala Daerah untuk tetap mempertahankan OPINI WTP. 2) Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan. 3) Dukungan anggaran yang memadai

Visi dan Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>		Faktor Penghambat : 1) Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Pengurus Barang Daerah. 2) Belum terintegrasinya SIM Pendapatan, Keuangan dan Aset.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah terpilih adalah

**“Visi : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”
(Tetep) "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

Sementara itu misi dan program unggulan yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

BPKAD dan BPPD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke pencapaian visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018, yaitu pada misi kedua Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Tabel 3.2
Hubungan Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
dengan Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 dan Renstra Provinsi Jawa
Tengah 2018-2023

No	Uraian	Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024	Renstra BPPD dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Renstra BKD Kota Pekalongan 2021-2026	Permasalahan	Faktor Pendorong dan Penghambat
1	Misi yang mendukung	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean governance</i>)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance and clean government</i> ".	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD belum tertib dan tepat waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Aset 2. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi 3. Perubahan Aplikasi 4. Masih rendahnya kesadaran WP dan WR dalam melaksanakan kewajibannya. 	Faktor Pendorong : <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen kepala Daerah untuk tetap mempertahankan OPINI WTP. 2) Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan. 3) Dukungan anggaran yang memadai 4) Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses, pengambilan keputusan 5) sosialisasi kepada WP

No	Uraian	Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024	Renstra BPPD dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Renstra BKD Kota Pekalongan 2021-2026	Permasalahan	Faktor Pendorong dan Penghambat
		Pembangunan yang merata dan berkeadilan				<p>dan WR secara Rutin.</p> <p>6) Pemberian Reward dan Punishment yang tegas kepada WR dan WP</p> <p>7) Tersusunnya roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemda 2021-2025.</p> <p>8) Motivasi kerja yang kuat</p>
2	Tujuan	<p>Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan</p> <p>Penerimaan Negara yang Optimal</p> <p>Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas</p> <p>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali</p> <p>Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</p>	<p>Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD</p> <p>Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah</p> <p>Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik</p> <p>Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah</p> <p>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan</p> <p>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik</p>		<p>Faktor Penghambat :</p> <p>1) Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Pengurus Barang Daerah.</p> <p>2) Belum terintegrasinya SIM Pendapatan, Keuangan dan Aset.</p> <p>3) Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah</p> <p>4) Penerimaan Retribusi Daerah yang masih tunai.</p> <p>5) Belum terintegrasinya pengawasan kinerja pelayanan (sesuai SOP) dengan teknologi. Selama ini penilaian kinerja masih berdasarkan kegiatan harian</p>
2	Sasaran	<p>penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal</p> <p>alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat</p> <p>Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel</p>	<p>Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah Perundangan</p> <p>Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah</p> <p>Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan IKU Renstra :</p> <p>1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu</p> <p>2. Ratio PAD</p>		

No	Uraian	Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024	Renstra BPPD dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Renstra BKD Kota Pekalongan 2021-2026	Permasalahan	Faktor Pendorong dan Penghambat
		Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			
		Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah IKU Renstra : Nilai SAKIP OPD		

3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi BKD Kota Pekalongan hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis BKD Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tantangan mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;
3. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;

4. Penatausahaan aset daerah secara tertib.
5. Peningkatan mutu pelayanan publik Perangkat daerah
6. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi OPD BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah.

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					
				Kondisi Awal (2021)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>									
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,82	79,07	79,32	79,57	79,82	80,07
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	100	100	100	100	100
			Ratio PAD	1,95%	1,95%	1,98%	2,01%	2,05%	2,06%
4		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	87,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.

Strategi dan kebijakan BKD Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel : 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan
BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan *Good Governance* dan *Clean Government*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan	1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	1.1.1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran	1.1.1.1 Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan anggaran bagi OPD
			1.1.1.2 Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah dalam proses akuntansi keuangan daerah
			1.1.1.3 Integrasi SIM Perencanaan, SIM Keuangan (dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan), SIM Aset, SIM Persediaan, SIM Pendapatan serta SIM Pelaporan Kinerja
		1.1.2 Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer	1.1.2.1 Pengembangan Sistem dan prosedur serta Standar operasional dalam fasilitasi penatausahaan Keuangan daerah
			1.1.2.2 Mengoptimalkan pengendalian anggaran
		1.1.3 menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD berbasis akrual dan	1.1.3.1 Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan yang berlaku

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		tepat waktu	1.1.3.2 Rekonsiliasi secara rutin dan berkala dengan OPD, Unit Kerja dan BLUD
		1.1.4 Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	1.1.4.1 Meningkatkan kualitas sumber daya serta koordinasi dengan pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah 1.1.4.2 Mengoptimalkan penerapan Sistem e-tax 1.1.4.3 Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah 1.1.4.4 Koordinasi dan kerjasama dengan BPN dalam rangka percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda
		1.1.5 Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah	1.1.5.1 Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah 1.1.5.2 Meningkatkan pemutakhiran data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 1.1.5.3 Melakukan Perhitungan Potensi Pajak Daerah
		1.1.6 Mengoptimalkan pelaporan serta penagihan pajak daerah	1.1.6.1 Meningkatkan upaya penagihan piutang pajak retribusi 1.1.6.2 Meningkatkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi 1.1.6.3 Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			1.1.6.4 Melakukan Pemeriksaan Pajak
			1.1.6.5 Penerapan Reward and Punishment yang jelas
			1.1.6.6 Meningkatkan pembinaan Wajib Pajak Daerah
2 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	2.1.1 Meningkatkan kualitas layanan publik perangkat daerah	2.1.1.1 Menerapkan E Kinerja
		2.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja perangkat daerah	2.1.2.1 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan
			2.1.2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
			2.1.2.3 Inventarisir kebutuhan diklat dan pengiriman peserta diklat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua urusan), 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program program yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran table 6.1

Tabel : 6.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan
BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan			Indikator Tujuan: Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan
				Indikator Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kepala BKD	
		05.02	KEUANGAN				12.276.554.000		11.007.026.740		9.859.171.032		9.726.830.815		9.745.020.053		9.773.755.234			
		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.874.633.000		6.687.938.000		6.691.572.600		6.695.314.900		6.699.170.500		6.703.141.000		Kepala BKD	
				Indikator Program :Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	11,91 persen	11,91 Persen	6.874.633.000	8,33 Persen	6.687.938.000	8,08 Persen	6.691.572.600	7,66 Persen	6.695.314.900	7,5 Persen	6.699.170.500	7,26 Persen	6.703.141.000			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.028.460.000		1.029.216.000		1.029.995.000		1.030.797.000		1.031.623.000		1.032.474.000		Kepala Bidang Anggaran	
				Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.028.460.000	100 Persen	1.029.216.000	100 Persen	1.029.995.000	100 Persen	1.030.797.000	100 Persen	1.031.623.000	100 Persen	1.032.474.000		Kepala Bidang Anggaran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	35.000.000	1 dokumen		
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	35.000.000	1 dokumen		
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	50.414.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	50.000.000	2 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	11.586.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	2 dokumen	12.000.000	12.000.000	2 dokumen		
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					727.530.000		727.908.000		728.297.000		728.699.000		729.111.000		729.537.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	35.000.000	1 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	681.245.000	4 dokumen	681.623.000	4 dokumen	682.012.000	4 dokumen	682.414.000	4 dokumen	682.826.000	683.252.000	4 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	2 dokumen	2 dokumen	11.285.000	2 dokumen	11.285.000	2 dokumen	11.285.000	2 dokumen	11.285.000	2 dokumen	11.285.000	11.285.000	2 dokumen		
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				142.930.000		143.308.000		143.698.000		144.098.000		144.512.000		144.937.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	35.000.000	1 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	4 dokumen	4 dokumen	94.708.000	4 dokumen	95.086.000	4 dokumen	95.476.000	4 dokumen	95.876.000	4 dokumen	96.290.000	96.715.000	5 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Dokumen perda	2 dokumen	2 dokumen	13.222.000	2 dokumen	13.222.000	2 dokumen	13.222.000	2 dokumen	13.222.000	2 dokumen	13.222.000	13.222.000	2 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan															
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	12 bulan	12 bulan	4.860.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	5.000.000	12 bulan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	6 kali	16 kali	21.140.000	16 kali	21.000.000	16 kali	21.000.000	16 kali	21.000.000	16 kali	21.000.000	21.000.000	16 kali		
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				0		0		0		0		0		0		
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				264.890.000		266.294.000		267.740.600		269.229.500		270.764.500		272.344.000	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 Persen	100 Persen	264.890.000	100 Persen	266.294.000	100 Persen	267.740.600	100 Persen	269.229.500	100 Persen	270.764.500	100 Persen	272.344.000	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				87.760.000		88.444.000		89.149.000		89.874.000		90.622.000		91.391.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 kali	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	12 kali	35.000.000	35.000.000	12 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan	67 OPD	67 OPD	50.285.000	67 OPD	50.969.000	67 OPD	51.674.000	67 OPD	52.399.000	67 OPD	53.147.000	53.916.500	67 OPD		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	3 dokumen	3 dokumen	2.475.000	3 dokumen	2.475.000	3 dokumen	2.475.000	3 dokumen	2.475.000	3 dokumen	2.475.000	2.475.000	3 dokumen		
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	2 laporan	30 laporan	23.000.000	30 laporan	23.000.000	30 laporan	23.000.000	30 laporan	23.000.000	30 laporan	23.000.000	23.000.000	30 laporan		
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	4 kali	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000	25.000.000	2 kali		
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				72.130.000		72.850.000		73.591.600		74.355.500		75.142.500		75.952.500		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3229 data SPT tahunan	3120 data SPT tahunan	51.230.000	3120 data SPT tahunan	51.950.000	3120 data SPT tahunan	52.691.600	3120 data SPT tahunan	53.455.500	3120 data SPT tahunan	54.242.500	55.052.500	3120 data SPT tahunan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	13 kali	14 kali	20.900.000	14 kali	20.900.000	14 kali	20.900.000	14 kali	20.900.000	14 kali	20.900.000	20.900.000	14 kali		
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	1 dokumen			
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	1 kali	3 kali	32.000.000	3 kali	32.000.000	3 kali	32.000.000	3 kali	32.000.000	3 kali	32.000.000	32.000.000	3 kali			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				389.060.000		392.428.000		393.837.000		395.288.400		396.783.000		398.323.000	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
				Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	389.060.000	100 Persen	392.428.000	100 Persen	393.837.000	100 Persen	395.288.400	100 Persen	396.783.000	100 Persen	398.323.000	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				57.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	67 PD/Unit kerja	68 laporan	57.000.000	68 laporan	57.000.000	68 laporan	57.000.000	68 laporan	57.000.000	68 laporan	57.000.000	57.000.000	68 laporan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	7 laporan	0 laporan	0	7 laporan	2.000.000	7 laporan	2.000.000	7 laporan	2.000.000	7 laporan	2.000.000	2.000.000	7 laporan		
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	14 laporan	13 laporan	3.661.000	13 laporan	8.000.000	13 laporan	8.000.000	13 laporan	8.000.000	13 laporan	8.000.000	8.000.000	13 laporan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	0 laporan	68 laporan	1.030.000	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0 laporan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	0 PD/ unit kerja	7 PD/ unit kerja	3.309.000	0 PD/ unit kerja	0	0 PD/ unit kerja	0	0 PD/ unit kerja	0	0 PD/ unit kerja	0	0	0 PD/ unit kerja		
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	40.000.000	5 kali	40.000.000	5 kali	40.000.000	5 kali	40.000.000	5 kali	40.000.000	40.000.000	5 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	7 laporan	55.000.000	7 laporan	55.000.000	7 laporan	55.000.000	7 laporan	55.000.000	7 laporan	55.000.000	55.000.000	7 laporan		
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	53.000.000	2 dokumen	53.000.000	2 dokumen	53.000.000	2 dokumen	53.000.000	2 dokumen	53.000.000	53.000.000	2 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 kali	1 kali	37.000.000	1 kali	37.000.000	1 kali	37.000.000	1 kali	37.000.000	1 kali	37.000.000	37.000.000	1 kali		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12 laporan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	10.000.000	12 laporan				
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	1 dokumen				
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				109.060.000		110.428.000		111.837.000		113.288.400		114.783.000		116.323.000				
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pembinaan/ desk/rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	0 kali	4 kali	16.160.000	4 kali	16.160.000	4 kali	16.160.000	4 kali	16.160.000	4 kali	16.160.000	16.160.000	4 kali				
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	0 laporan	4 laporan	37.420.000	4 laporan	37.420.000	4 laporan	37.420.000	4 laporan	37.420.000	4 laporan	37.420.000	37.420.000	4 laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan	0 kali	12 kali	55.480.000	12 kali	56.848.000	12 kali	58.257.000	12 kali	59.708.400	12 kali	61.203.000	62.743.000	12 kali			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.192.223.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Indikator Kegiatan : Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 Persen	100 Persen	5.192.223.000	100 Persen	5.000.000.000	100 Persen	5.000.000.000	100 Persen	5.000.000.000	100 Persen	5.000.000.000	100 Persen	5.000.000.000	5.000.000.000		Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5.192.223.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan dana BTT	12 bulan	12 bulan	5.192.223.000	12 bulan	5.000.000.000	12 bulan	5.000.000.000	12 bulan	5.000.000.000	12 bulan	5.000.000.000	5.000.000.000	12 bulan			
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.569.300.000		2.605.558.000		1.459.841.000		1.314.252.000		1.318.795.500		1.333.475.500		Kepala BKD	
				Indikator Program :Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 Persen	100 Persen	2.569.300.000	100 Persen	2.605.558.000	100 Persen	1.459.841.000	100 Persen	1.314.252.000	100 Persen	1.318.795.500	100 Persen	1.333.475.500			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.569.300.000		2.605.558.000		1.459.841.000		1.314.252.000		1.318.795.500		1.333.475.500		Kepala Bidang Pengelolaan BMD	
				Indikator Kegiatan : Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 Persen	100 Persen	2.569.300.000	100 Persen	2.605.558.000	100 Persen	1.459.841.000	100 Persen	1.314.252.000	100 Persen	1.318.795.500	100 Persen	1.333.475.500			Kepala Bidang Pengelolaan BMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku standar harga yang disusun	2 buku	2 buku	55.000.000	2 buku	55.000.000	2 buku	55.000.000	2 buku	55.000.000	2 buku	55.000.000	55.000.000	2 buku		
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2 buku	2 buku	30.000.000	2 buku	30.000.000	2 buku	30.000.000	2 buku	30.000.000	2 buku	30.000.000	30.000.000	2 buku		
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah				1.475.000.000		1.507.100.000		357.100.000		207.100.000		207.100.000		217.100.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah papan nama aset	0 buah	55 buah	61.400.000	55 buah	61.400.000	55 buah	61.400.000	55 buah	61.400.000	55 buah	61.400.000	61.400.000	55 buah		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah patok batas tanah	600 patok	600 patok	45.700.000	600 patok	45.700.000	600 patok	45.700.000	600 patok	45.700.000	600 patok	45.700.000	45.700.000	600 patok		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengajuan sertifikat	282 bidang	800 bidang	1.367.900.000	800 bidang	1.400.000.000	78 bidang	250.000.000	20 bidang	100.000.000	20 bidang	100.000.000	110.000.000	20 bidang		
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	3 jenis	3 jenis	65.000.000	3 jenis	65.000.000	3 jenis	65.000.000	3 jenis	65.000.000	3 jenis	65.000.000	65.000.000	3 jenis		
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik				323.590.000		325.480.000		327.427.000		329.432.000		331.497.000		333.624.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah																
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat	1 unit	1 unit	146.700.000	1 unit	146.700.000	1 unit	146.700.000	1 unit	146.700.000	1 unit	146.700.000	146.700.000	1 unit		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	2 unit	118.410.000	2 unit	120.300.000	2 unit	122.247.000	2 unit	124.252.000	2 unit	126.317.000	128.444.500	2 unit		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	0 unit	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	30.000.000	3 unit		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	1 kali	5 kali	28.480.000	5 kali	28.480.000	5 kali	28.480.000	5 kali	28.480.000	5 kali	28.480.000	28.480.000	5 kali		
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				620.710.000		622.978.000		625.314.000		627.720.000		630.198.500		632.751.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	67 laporan	65 laporan	101.068.000	80 laporan	622.978.000	80 laporan	625.314.000	80 laporan	627.720.000	80 laporan	630.198.500	632.751.000	80 laporan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	30 OPD	30 OPD	259.821.000	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	0	0	0 OPD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	36 unit kerja	35 unit kerja	259.821.000	0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	0	0	0 unit kerja	
				Indikator Sasaran 1.1.2 Ratio PAD	2,12%	1,95%		1,95%		1,98%		2,01%		2,05%		2,06%		Kepala BKD	
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.832.621.000		1.713.530.740		1.707.757.432		1.717.263.915		1.727.054.053		1.737.138.734	Kepala BKD	
				Indikator Program :Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	32,88 Persen	5 Persen	2.832.621.000	5 Persen	1.713.530.740	5 Persen	1.707.757.432	5 Persen	1.717.263.915	5 Persen	1.727.054.053	5 Persen	1.737.138.734		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				2.832.621.000		1.713.530.740		1.707.757.432		1.717.263.915		1.727.054.053		1.737.138.734	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi dan Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan	
		zx		Indikator Kegiatan : Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	118,05 Persen	100 Persen	2.832.621.000	100 Persen	1.713.530.740	100 Persen	1.707.757.432	100 Persen	1.717.263.915	100 Persen	1.727.054.053	100 Persen	1.737.138.734	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				151.400.000		131.400.000		306.400.000		306.400.000		306.400.000		306.400.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax	1 kali	1 kali	125.850.000	1 kali	105.850.000	1 kali	105.850.000	1 kali	105.850.000	1 kali	105.850.000	105.850.000	1 kali		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Award yang dilaksanakan															
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	660.000	2 dokumen	660.000	2 dokumen	660.000	2 dokumen	660.000	2 dokumen	660.000	660.000	2 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12 laporan	12 laporan	3.700.000	12 laporan	3.700.000	12 laporan	3.700.000	12 laporan	3.700.000	12 laporan	3.700.000	3.700.000	12 laporan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6 kali	6 kali	15.240.000	6 kali	15.240.000	6 kali	15.240.000	6 kali	15.240.000	6 kali	15.240.000	15.240.000	6 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	5.950.000	1 kali	5.950.000	3 kali	5.950.000	3 kali	5.950.000	3 kali	5.950.000	5.950.000	3 kali		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan senam sehat PBB yang dilaksanakan	0 kali	0 kali	0	0 kali	0	1 kali	175.000.00	1 kali	175.000.00	1 kali	175.000.00	175.000.000	1 kali		
		5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah				219.350.000		223.454.000		227.681.000		232.035.000		236.519.000		241.138.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	6196 surat	3060 surat	219.350.000	3060 surat	223.454.000	3060 surat	227.681.000	3060 surat	232.035.000	3060 surat	236.519.000	241.138.000	3060 surat		
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				159.500.000		159.500.000		159.500.000		159.500.000		159.500.000		159.500.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	8 wajib pajak	8 wajib pajak	39.660.000	8 wajib pajak	39.660.000	8 wajib pajak	39.660.000	8 wajib pajak	39.660.000	8 wajib pajak	39.660.000	39.660.000	8 wajib pajak		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50 kali	50 kali	119.840.000	50 kali	119.840.000	50 kali	119.840.000	50 kali	119.840.000	50 kali	119.840.000	119.840.000	50 kali		
		zx		Indikator Kegiatan : Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	22,73%	4,5 persen	2.832.621.000	4,6 persen	1.713.530.740	4,7 persen	1.707.757.432	4,8 persen	1.717.263.915	4,9 persen	1.727.054.053	5,0 persen	1.737.138.734	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan	
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	2000 objek	1500 objek	15.500.000	1500 objek	15.500.000	1500 objek	15.500.000	1500 objek	15.500.000	1500 objek	15.500.000	15.500.000	1500 objek		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	0 objek	1140 objek	14.500.000	1140 objek	14.500.000	1140 objek	14.500.000	1140 objek	14.500.000	1140 objek	14.500.000	14.500.000	1140 objek		
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				351.130.000		244.718.000		55.941.000		57.202.000		58.500.000		59.837.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi baru yang diadakan	0 aplikasi	3 aplikasi	307.600.000	1 aplikasi	200.000.000	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0 aplikasi		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	7 aplikasi	8 aplikasi	43.530.000	8 aplikasi	44.718.000	8 aplikasi	55.941.000	8 aplikasi	57.202.000	8 aplikasi	58.500.000	59.837.000	8 aplikasi		
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan				1.177.000.000		176.550.000		176.550.000		176.550.000		176.550.000		176.550.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Bangunan (BPHTB)																
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	2963 berkas	2000 berkas	19.476.000	2000 berkas	19.476.000	2000 berkas	19.476.000	2000 berkas	19.476.000	2000 berkas	19.476.000	19.476.000	2000 berkas		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	93 buku	94 buku	3.906.000	94 buku	3.906.000	94 buku	3.906.000	94 buku	3.906.000	94 buku	3.906.000	3.906.000	94 buku		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	1 buku	4 buku	3.168.000	4 buku	3.168.000	4 buku	3.168.000	4 buku	3.168.000	4 buku	3.168.000	3.168.000	4 buku		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	0 objek	9300 objek	1.150.450.000	8000 objek	150.000.000	8000 objek	150.000.000	8000 objek	150.000.000	8000 objek	150.000.000	150.000.000	8000 objek		
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	95680 lembar	93000 lembar	271.600.000	93000 lembar	271.600.000	93000 lembar	271.600.000	93000 lembar	271.600.000	93000 lembar	271.600.000	271.600.000	93000 lembar		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	9387 lembar	19000 lembar	28.400.000	19000 lembar	28.400.000	19000 lembar	28.400.000	19000 lembar	28.400.000	19000 lembar	28.400.000	28.400.000	19000 lembar		
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				380.241.000		383.224.740		386.297.432		389.462.915		392.724.053		396.081.734		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan	1 orang/bulan	31.058.000	1 orang/bulan	31.989.740	1 orang/bulan	32.949.432	1 orang/bulan	33.937.915	1 orang/bulan	34.956.053	36.004.734	1 orang/bulan		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah wajib pajak dan	18485 WP/WR	14400 WP/WR	349.183.000	14400 WP/WR	351.235.000	14400 WP/WR	353.348.000	14400 WP/WR	355.525.000	14400 WP/WR	357.768.000	360.077.000	14400 WP/WR		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				wajib reklame yang terlayani																
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				64.000.000		64.684.000		65.388.000		66.114.000		66.861.000		67.632.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi		1500 berkas	64.000.000	1500 berkas	64.684.000	1500 berkas	65.388.000	1500 berkas	66.114.000	1500 berkas	66.861.000	67.632.000	1500 berkas			
		X.XXx	NON URUSAN				15.247.729.000		18.167.373.950		16.984.021.548		15.892.095.375		16.593.166.644		17.314.881.926			
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik				Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat	78,63	78,82		79,07		79,32		79,57		79,82		80,07				
	Sasaran 2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Indikator Sasaran 2.1.1: Nilai SAKIP OPD	81,12	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		85,00		Kepala BKD		
		xX.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.247.729.000		18.167.373.950		16.984.021.548		15.892.095.375		16.593.166.644		17.314.881.926		Kepala BKD	
				Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen	100 Persen	12.102.129.000	100 Persen	12.693.091.950	100 Persen	13.319.976.548	100 Persen	13.978.205.375	100 Persen	14.676.345.644	100 Persen	15.395.042.926			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.220.000		18.150.000		18.150.000		18.150.000		25.150.000		18.150.000		Sekretaris	
					Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	1.125.800.000	100 Persen	963.900.000	100 Persen	963.900.000	100 Persen	963.900.000	100 Persen	1.187.900.000	100 Persen	963.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				kinerja perangkat daerah															
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.750.000		4.700.000		4.700.000		4.700.000		11.700.000		4.700.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4.680.000	2 dokumen	4.700.000	2 dokumen	4.700.000	2 dokumen	4.700.000	2 dokumen	4.700.000	4.700.000	2 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.070.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	7.000.000	0	0 dokumen		
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.250.000	2 dokumen	2.250.000	2.250.000	2 dokumen		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.220.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	3.200.000	4 dokumen	3.200.000	4 dokumen	3.200.000	4 dokumen	3.200.000	4 dokumen	3.200.000	3.200.000	4 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	2 dokumen		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	1.000.000	12 bulan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	4.020.000	5 dokumen	4.000.000	5 dokumen	4.000.000	5 dokumen	4.000.000	5 dokumen	4.000.000	4.000.000	5 dokumen		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.077.909.000		12.674.941.950		13.301.826.548		13.960.055.375		14.651.195.644		15.376.892.926		Sekretaris
				Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	367.350.270.000	100 Persen	385.261.258.500	100 Persen	404.067.796.440	100 Persen	423.814.661.250	100 Persen	444.548.869.320	100 Persen	466.319.787.780		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.940.659.000		12.537.691.950		13.164.576.548		13.822.805.375		14.513.945.644		15.239.642.926		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	11.940.659.000	12 bulan	12.537.691.950	12 bulan	13.164.576.548	12 bulan	13.822.805.375	12 bulan	14.513.945.644	15.239.642.926	12 bulan		
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	135.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	135.000.000	135.000.000	12 bulan		
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	1 dokumen	2.250.000	2.250.000	1 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	1.632.070.000	100 persen	1.634.122.000	100 persen	1.636.236.000	100 persen	1.638.413.000	100 persen	1.640.655.000	100 persen	1.642.964.000		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				908.000.000		908.000.000		908.000.000		908.000.000		908.000.000		908.000.000		Sekretaris
				Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	49.465.500.000	100 Persen	49.465.500.000	100 Persen	49.465.500.000	100 Persen	49.465.500.000	100 Persen	49.465.500.000	100 Persen	49.465.500.000		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		395.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	12 bulan	189.664.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	190.000.000	12 bulan	190.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	68 unit	27 unit	205.336.000	15 unit	205.000.000	15 unit	205.000.000	15 unit	205.000.000	15 unit	205.000.000	205.000.000	15 unit		
		X.XX.01.2.06.	Penyediaan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		03	Peralatan Rumah Tangga																	
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	18.000.000	12 bulan			
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	11 bulan	110.000.000	11 bulan	110.000.000	11 bulan	110.000.000	11 bulan	110.000.000	11 bulan	110.000.000	110.000.000	11 bulan			
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	50.000.000	12 bulan			
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	2.500.000	12 bulan			
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000		325.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	290 orang/kali	200 orang/kali	325.000.000	200 orang/kali	325.000.000	200 orang/kali	325.000.000	200 orang/kali	325.000.000	200 orang/kali	325.000.000	325.000.000	200 orang/ kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				714.570.000		716.622.000		718.736.000		720.913.000		723.155.000		725.464.000		Sekretaris	
				Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	40.546.320.000	100 Persen	40.661.232.000	100 Persen	40.779.616.000	100 Persen	40.901.528.000	100 Persen	41.027.080.000	100 Persen	41.156.384.000			
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	3.000.000	12 bulan			
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				506.400.000		506.400.000		506.400.000		506.400.000		506.400.000		506.400.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	506.400.000	12 bulan	506.400.000	12 bulan	506.400.000	12 bulan	506.400.000	12 bulan	506.400.000	506.400.000	12 bulan			
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				205.170.000		207.222.000		209.336.000		211.513.000		213.755.000		216.064.000			
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	205.170.000	12 bulan	207.222.000	12 bulan	209.336.000	12 bulan	211.513.000	12 bulan	213.755.000	216.064.000	12 bulan			
				Indikator Program : Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	1.513.530.000	100 persen	3.840.160.000	100 persen	2.027.809.000	100 persen	275.477.000	100 persen	276.166.000	100 persen	276.875.000			
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat				0		0		0		0		0		0		Sekretaris	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Daerah																
				Indikator Kegiatan : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.140.000.000	3.516.000.000		1.703.000.000		0		0		0		0	Sekretaris	
				Indikator Kegiatan : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	5.700.000.000	10.641.000.000	100 Persen	5.515.000.000	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0		
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	2.313.000.000		1.000.000.000		0		0		0		0		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan	14 unit	0 unit	0	2.313.000.000	3 unit	1.000.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit		
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.140.000.000	1.203.000.000		703.000.000		0		0		0		0		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	0 unit	2 unit	1.140.000.000	0	1 unit	300.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan	0 unit	0 unit	0	1.203.000.000	20 unit	403.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0 unit		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.530.000		324.160.000		324.809.000		275.477.000		276.166.000		276.875.000	Sekretaris	
				Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	21.051.210.000	100 Persen	18.337.120.000	100 Persen	18.374.113.000	100 Persen	15.662.189.000	100 Persen	15.701.462.000	100 Persen	15.741.875.000		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				133.530.000		134.160.000		134.809.000		135.477.000		136.166.000		136.875.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	42 unit	47 unit	133.530.000	47 unit	134.160.000	47 unit	134.809.000	47 unit	135.477.000	47 unit	136.166.000	136.875.000	47 unit		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		150.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	1 unit	200.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	100.000.000	1 unit		
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah, Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kantor atau Bangunan Lainnya																
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	40.000.000	12 bulan		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	Sekretaris	
				Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	285.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	285.000.000	100 Persen	285.000.000		
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		
				Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	0 kali	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	9.500.000	2 kali		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BKD Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Uraian Indikator		Satuan	Kondisi Awal		Tahun Ke :					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
Indikator Tujuan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,63	78,82	79,07	79,32	79,57	79,82	80,07	80,07
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKU Renstra	Nilai SAKIP OPD	Indeks	81,12	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	87,5
	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio PAD	persen	2,12	1,95%	1,95%	1,98%	2,01%	2,05%	2,06%	2,06%
Indikator Program	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	9,96	11,91	8,33	8,08	7,66	7,5	7,26	7,26
Indikator Kegiatan	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Uraian Indikator		Satuan	Kondisi Awal		Tahun Ke :					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
Indikator Program	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Program	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	0,33	5	5	5	5	5	5	5
Indikator Kegiatan	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	persen	118,05	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	persen	22,73	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0
Indikator Program	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Uraian Indikator		Satuan	Kondisi Awal		Tahun Ke :					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
Indikator Kegiatan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Kegiatan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan yang digunakan sebagai panduan bagi para pengelola Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stackeholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan memuat arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Pekalongan, 24 September 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005